



## POLITIK UANG DAN KONFLIK HORIZONTAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA, DI KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR

Hariato<sup>1</sup>, Mudji Rahardjo<sup>2</sup>, Bambang Martin Baru<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun

E-mail: <sup>1</sup>[hariato@unmer-madiun.ac.id](mailto:hariato@unmer-madiun.ac.id)

---

### Abstrak

Dalam pemilihan kepala desa, selalu terjadi persaingan antar calon kepala desa untuk saling mempengaruhi agar mendapatkan dukungan suara mayoritas dari warga desa. Akan tetapi dalam proses perebutan pengaruh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar nilai-nilai demokrasi, seperti politik uang, penyebaran rumor atau isu-isu politik yang negatif, melakukan intrik-intrik politik yang tidak bermoral, akibatnya dapat menjurus terjadinya konflik horizontal antara kelompok warga desa. Mekanisme pemilihan kepala desa demikian, dapat menjadi hambatan dalam perkembangan demokrasi desa. Untuk itu, tujuan penelitian ini untuk melihat faktor politik uang dan hubungannya dengan konflik horizontal dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan obyek penelitian di 5 (lima) desa Kabupaten Magetan yang dipilih secara purposive sampling, dengan analisis data dilakukan melalui analisis modus.

**Kata kunci:** politik uang, konflik horizontal, pemilihan kepala desa

### Abstract

*In the village head election, there is always competition between candidates to influence each other in order to gain majority support from the villagers. However, in the process of seizing influence is done in ways that violate the values of democracy, such as money politics, the dissemination of rumors or negative political issues, immoral political intrigues, consequently can lead to horizontal conflict between groups of citizens village. Such a mechanism of village head election can be an obstacle in the development of village democracy. Therefore, the purpose of this study was to look at the money politics factor and its relation to horizontal conflict in village head election. While the object of research in 5 (five) villages of Magetan Regency selected by purposive sampling, with data analysis done through mode analysis.*

**Keywords:** money politics, horizontal conflict, village head election

---

### I. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan mekanisme politik dalam suksesi kepemimpinan secara konstitusional di tingkat pemerintahan desa, dimana warga desa memiliki hak untuk dipilih dan memilih calon pemimpinnya. Pilkades diharapkan dapat menghasilkan calon kepala desa yang aspiratif, melalui mekanisme persaingan yang jujur dan terbuka sehingga warga desa dapat menentukan pilihan politiknya sesuai dengan keyakinannya. Keterlibatan

warga desa dalam pemilihan kepala desa, sebagai manifestasi tanggung jawab warga dalam menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat. Menurut Sumarno (1990) dalam Harianto,dkk (2017), “*puts it, in principle, participation is a reflection of the political behavior of every individual as a citizen who feels responsible for the survival of his nation*” (pada prinsipnya partisipasi merupakan refleksi dari perilaku politik setiap individu sebagai warga negara yang merasa bertanggung



jawab atas kelangsungan hidup bernegaranya).

Wajar dalam setiap pemilihan kepala desa selalu diwarnai terjadinya persaingan antar calon kepala desa untuk memperoleh dukungan suara dari warga desa. Namun yang menjadi permasalahannya, persaingan itu tidak jarang dilakukan dengan politik uang, dengan berbagai modus dilakukan seperti memberikan bantuan (infaq) berupa sembako, memberikan bantuan fasilitas sosial terhadap lingkungan masyarakat tertentu, dan bahkan sampai dengan cara fulgar membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga desa. Uang dinilai sebagai sumber daya politik yang efektif untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan. Schaffer & Schadler (2007) dalam Sumarto (2014) “*money politic* melibatkan “pasar dukungan politik” (*electoral market*) dengan “pembeli suara” (*vote buyers*) memberikan uang baik dalam bentuk utuh berdasarkan besaran nominalnya ataupun dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh “penjual suara” (*vote sellers*), dan penjual suara menyerahkan suaranya sebagai wujud imbalan atas uang atau barang dan jasa yang telah diterimanya. Uang dapat dipakai sebagai sarana untuk mencari dukungan politik dari pertukaran uang kepada pemilih atau penjual suara, sehingga pemilih menyerahkan hak pilihnya untuk mendukung kepada pembeli suara”. Stokes (2007) dalam Sumarto (2014) menjelaskan secara sederhana “praktek pembelian suara diartikan sebagai pertukaran antara uang dengan suara pemilih. Pembelian suara melalui pertukaran sejumlah uang dalam pemilihan seringkali terjadi dalam fenomena politik dimana terjadi transaksi antara pembeli suara (kandidat) dan penjual suara (rakyat). Transaksi jual beli suara ini dapat dimaknai sebagai praktek penyimpangan dalam politik, karena dasar terbentuknya dukungan suara bukan terletak pada gagasan, ide yang

dituangkan dalam visi, misi, dan program kerjanya melainkan karena penyuaipan atas hak pilih dalam pemilihan”. Schaffer, ed. (2007) “tidak semua transaksi komersial dapat diartikan sebagai praktek pembelian suara, akan tetapi terdapat dua logika transaksi yang dapat dikatakan sebagai praktek pembelian suara yakni: (1) para aktor yang terlibat (penjual dan pembeli) terlibat dalam pertukaran yang efektif antara uang dengan suara, jika pembeli tidak membayar penjual tidak akan memberikan suaranya; (2) pembeli dan penjual mengerti apa yang sedang mereka lakukan, bahwa mereka memasuki hubungan timbal balik dari pertukaran antara uang dengan suara”.

Politik uang dalam pilkades, dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sudah berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi, bahkan telah menjadi tradisi dalam setiap pemilihan kepala desa. Fenomena politik ini secara tidak langsung memberikan legitimasi atas keberlangsungan politik uang dalam pemilihan kepala desa, kondisi inilah seringkali dimanfaatkan oleh masing-masing calon kepala desa untuk berebut pengaruh kepada warga desa. Melalui kader-kader elitnya, masing-masing calon kepala desa untuk melakukan politik uang kepada sejumlah warga desa sebagai kontrak politik dalam pemilihan kepala desa. Politik uang dalam pilkades seringkali berujung pada konflik horisontal antar kelompok masyarakat pendukung calon kepala desa, karena masing-masing calon berusaha untuk mengguli besaran atau jumlah uang yang digunakan untuk dibagi-bagikan kepada warga desa. Disamping itu, dilakukan pula dengan cara-cara yang negatif, seperti menebar rumor atau isu-isu politik yang kotor, melakukan intrik-intrik politik yang tidak bermoral. Kondisi ini dapat menciptakan kedalam suasana saling hasut menghasut, saling curiga, saling tidak percaya, saling bermusuhan, sehingga terjerumus ke dalam permainan kotor dari klik-klik yang bersaing untuk kepentingan



masing-masing calon kepala desa. Propaganda yang dilakukan kader-kader elit yang diarahkan untuk mendiskreditkan calon kepala desa yang lain, dapat berpengaruh dan menanamkan sentimen kelompok-kelompok warga. Kekeruhan politik diatas, sebagai tempat yang subur bagi orang-orang *opportunistis* yang tidak memiliki integritas atau kepribadian, akibatnya mempercepat proses kebobrokan masyarakat yang menjurus kepada lahirnya suasana suram dan merisaukan. Proses pemilihan yang diwarnai dengan perilaku politik yang *opportunistis*, menjadikan proses pemilihan kepala desa tidak berjalan secara demokratis.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Pemilihan kepala desa merupakan bagian yang esensial untuk menjamin tegaknya kehidupan demokrasi desa. Melalui pemilihan kepala desa, warga desa diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan dipihak lain warga diberikan kesempatan menentukan calon pemimpinnya. Untuk itu, mekanisme pemilihan kepala desa harus dapat menjamin kelangsungan demokratis. Pemilihan dalam sistem politik modern dapat dibedakan dua type pemilu yaitu: pemilu sebagai formalitas politik dan pemilu sebagai alat demokrasi. Menempatkan pemilu sebagai alat demokrasi berarti memposisikan pemilu dalam fungsi esensinya sebagai wahana pembentuk *representatif government*. Sebuah pemilu yang demokratis, sejauhmana kompetisi dilakukan secara fair dan jujur sehingga menghasilkan representasi politik. Menurut Huntington dalam Saefullah (1997) “pemilu dan demokrasi hanya mungkin dilakukan jika pemilu itu mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sirkulasi kekuasaan dalam sistem politik. Sedangkan bila sebuah pemilu kehilangan ciri kompetitifnya, maka ia menjadi ritual politik yang semu, sebuah manipulasi untuk mencari legitimasi semata.

Kemenangan satu konstantan atau kandidat calon lebih merupakan hasil rekayasa kekuasaan ketimbang hasil pilihan politik rakyat. Pemilu seperti ini sekedar merupakan formalitas politik dan tentu saja sistem politik yang menjalankannya sulit dikategorikan sebagai demokrasi”.

Dalam prakteknya, pemilihan kepala desa selalu diwarnai politik uang dan bahkan berujung pada konflik horisontal antar kelompok warga desa. Politik uang selalu menjadi modus yang efektif dalam upaya mempengaruhi dan menggalang massa untuk memberikan dukungan kepada calon pemimpin. Menurut Nassmacher dalam Abisono (2012) “uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya”. Dengan demikian uang menjadi alat untuk mencari dukungan dalam proses pemilihan umum, uang dapat didistribusikan melalui tahapan pemilihan seperti mendapatkan dukungan dari partai politik, memobilisasi massa dalam kampanye, dan bahkan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilihan. Menurut Jacobson (1980) dalam Badoh & Djani (2010) mempertegas hal ini dengan mengatakan: “*Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it*” (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil Pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang).

Dalam referensi politik, politik uang sampai saat ini belum adanya kejelasan terkait makna politiknya, karena masih ada perdebatan apakah politik uang termasuk dalam kategori korupsi politik. Pratikno menyatakan bahwa “banyak perdebatan tentang definisi *money politics* yang telah sering dikemukakan hingga



saat ini, tetapi yang jelas, *money politics* merupakan fenomena politik yang tidak standar dalam relasi antar pelaku politik. Oleh karena itu, untuk memahami *money politics*, harus dimulai dengan mengidentifikasi tentang relasi politik yang standar, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan dari yang standar ini, yang salah satu bentuknya adalah *money politics*". Dalam *Encyclopedia of Sosial Science* memasukkan korupsi dalam peristilahan politik, tepatnya dalam entri *political corruption*. Istilah tersebut memuat cakupan makna sebagai penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kemanfaatan politik. Arnold Heidenheimer (1993) mendefinisikan korupsi politik sebagai "*any transaction between private and public sector actors through which collective goods are illegitimately converted into private-regarding*". Misalnya, seorang pejabat dikategorikan korupsi bilamana ia menerima hadiah dari seseorang supaya ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah (Sabilal Rosyad).

Sementara, faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat desa bahwa politik uang adalah sesuatu yang wajar, dan bahkan secara normatif dianggap syah-syah saja. Menurut Umam, (2006), "perilaku *money politics*, dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasnamakan sebagai bantuan, *infaq*, *shadaqah* dan lain-lain. Pergeseran istilah *money politics* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*)

sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan". Dalam perspektif moralitas masih menjadi pertentangan apakah *money politics* itu haram atau tidak, sementara penilaian beberapa agamawan bahwa *money politics* itu haram, dan ada pula penilaian agamawan yang tidak seekstrem itu, sehingga membingungkan masyarakat (Ismawan, 1999).

Menurut Alfonso, Politik Uang akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat, karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu *trust* telah dibeli dengan uang. Dampaknya, pembangunan menjadi tidak lancar dan kompetisi internasional tidak terkejar, sehingga masyarakat seharusnya berfikir dua kali jika menerima uang dari para kandidat yang menginginkan dirinya agar bisa terpilih (Ismail). Yusrill, "demoralisasi yang diakibatkan oleh *Money Politics* akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat". Berdasarkan Undang Undang No. 3 tahun 1999, menyebutkan: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu" (Ismail). Dengan demikian politik uang, akan merusak



mental masyarakat, dengan uang segala sesuatunya dapat mudah diraih atau dicapainya termasuk dalam pemilihan umum. Disadari atau tidak, dengan adanya politik uang dapat mendorong suburnya praktek korupsi, karena seseorang terpilih dalam menduduki jabatan publik melalui uang maka kemungkinan besar mereka akan berorientasi bagaimana untuk mengembalikan biayanya dalam pemilihan tersebut.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian menfokuskan pada faktor politik uang dan konflik horisontal dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan lokasi penelitian di Kabupaten Magetan, dengan ditetapkan sebagai sampel penelitian di 5 (lima) kecamatan yang terpilih, meliputi kecamatan Takeran, Maospati, Karangrejo, Barat, dan Magetan yang masing-masing kecamatan diwakili 2 (dua) desa terpilih. Responden penelitian ditetapkan berdasarkan teknik "*Purposive Sampling*", dengan jumlah informan 10 orang untuk masing-masing desa, terdiri dari; panitia pemilihan 2 orang, calon kepala desa 2 orang, dan warga desa yang memiliki hak pilih 6 orang.

Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, daftar pertanyaan, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan metode *deskriptif kuantitatif*, dan untuk melakukan analisis data, yang datanya bersifat ordinal maka diperlukan skala pengukuran likert. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain: a) Sangat setuju dengan skor 5, b) Setuju dengan skor 4, c) Ragu-ragu dengan skor 3, d) Tidak setuju dengan skor 2, dan e) Sangat tidak setuju dengan skor 1. Dengan mendasarkan pada skala pengukuran tersebut, maka analisis data menggunakan analisis modus dengan mengklasifikasikan kedalam 5 (lima) kategori nilai: Sangat baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

#### *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa*

Politik uang selalu terjadi dalam setiap pemilihan kepala desa, karena uang sebagai sumber daya politik yang efektif untuk memobilisasi warga desa dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, setiap calon kepala desa telah mempertimbangkan dan mempersiapkan dana yang cukup guna dibagi-bagikan kepada warga desa dengan tujuan dapat mengarahkan pilihan politik warga dalam pemilihan kepala desa. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya politik uang, antara lain: (1) faktor persaingan yang ketat antar calon kepala desa, (2) faktor ekonomi, (3) faktor pendidikan, (4) faktor budaya, dan (5).faktor rendahnya pengawasan panitia pemilihan kepala desa.

Persaingan yang ketat antar calon kepala desa, mendorong semakin besar usaha untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Melalui kader-kader elit yang dibentuk dapat menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi warga desa dalam menggunakan hak pilihnya, kader-kader elit secara langsung berinteraksi dengan warga desa sehingga dapat dimonitor setiap perkembangan yang terjadi. Banyak pengalaman membuktikan bahwa yang memenangkan persaingan kepala desa adalah calon kepala desa yang memberikan uang dalam jumlah lebih besar kepada warga desa, bahkan sebagian besar warga desa beranggapan bahwa uang sebagai simbol status sosial bagi kepala desa. Oleh karena itu, calon kepala desa rela mengorbankan sejumlah dana untuk meraih kemenangan dalam pemilihan kepala desa. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa:

*"politik uang disebabkan karena adanya persaingan yang ketat antar calon kepala desa, masing-masing memiliki kekuatan massa pendukung yang sama kuat sehingga mendorong keyakinan untuk*



*memenangkan persaingan dalam pemilihan kepala desa. Keyakinan inilah menjadi pemicu semakin menguatnya politik uang dalam berebut pengaruh kepada warga desa” (FGD, 16 Juni 2017).*

Kekuatan yang imbang dalam persaingan kepala desa memberikan dorongan untuk semakin kuat usaha mengungguli calon kepala desa yang lain melalui berbagai cara seperti politik uang. Disatu sisi, kondisi sosial ekonomi yang kurang baik mendorong warga desa untuk mudah dimobilisasi uang dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa. Kondisi ekonomi ini dimanfaatkan oleh masing-masing calon kepala desa, melalui kader-kader elitnya untuk membagikan uang kepada warga desa yang dimungkinkan dapat diarahkan dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala desa. Bahkan tidak jarang calon kepala desa melakukan hal-hal diluar rasional dengan jumlah besaran uang yang dibagikan kepada warga desa. Hasil temuan penelitian menunjukkan:

*“kondisi sosial ekonomi cenderung menjadi alasan kuat bagi warga desa untuk menerima sejumlah uang dari calon kepala desa, dengan rela memberikan dukungan suaranya pada saat pencoblasan pemilihan kepala desa” (FGD, 16 Juli 2017).*

Bahkan kecenderungannya politik uang telah menjadi tradisi yang berkembang dalam setiap pemilihan kepala desa, sehingga politik uang dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk membagikan uang kepada warga desa oleh calon kepala desa. Penilaian inilah secara tidak langsung menjadikan legalitas politik uang dalam pemilihan kepala desa.

Disamping itu, rendahnya pendidikan dan kepercayaan warga terhadap mekanisme pemilihan kepala desa, turut pula mendorong terjadinya politik uang. Rendahnya pendidikan

warga membuat warga kurang rasional dan proporsional dalam menyikapi momen pemilihan kepala desa, sehingga mudah dimanfaatkan oleh calon kepala desa untuk mengarahkan kepentingannya dalam pemilihan kepala desa. Maka dari itu, tidak jarang calon kepala desa melakukan intrik-intrik politik kotor yang berusaha meniadakan eksistensi dari calon kepala desa yang lain, dengan tujuan agar warga desa dapat mempercayai dan pada akhirnya dapat diarahkan orientasi pilihan politiknya. Rendahnya kepercayaan warga terhadap proses pemilihan kepala desa, juga turut terjadinya praktek politik uang. Penilaian warga desa, siapapun yang akan terpilih sebagai kepala desa tidak akan dapat melakukan perubahan-perubahan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, sikap skeptis warga desa tersebut, dimanfaatkan oleh tim sukses calon kepala desa untuk memobilisasi suara dalam pemilihan kepala desa. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan:

*“Warga desa dalam mempertimbangkan pilihan politiknya dalam pemilihan kepala desa dilihat dari calon kepala desa yang memberikan sejumlah uang yang lebih besar karena simbol kemapanan dan status sosial bagi calon kepala desa” (FGD, 16 Juli 2017).*

Maraknya praktek politik uang juga disebabkan karena rendahnya pengawasan panitia pemilihan kepala desa, panitia tidak memiliki ketegasan untuk melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa. Sebelumnya panitia pemilihan dan bersama calon kepala desa telah menyepakati bahwa upaya mengatasi terjadinya politik uang melalui kesepakatan untuk mengkoordinir imbalan uang yang akan diberikan kepada warga desa yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan, baik besarnya jumlah uang yang dihimpun dari calon kepala desa maupun jumlah besaran uang yang

akan diberikan kepada warga desa. Dengan kesepakatan itu, bertujuan untuk meniadakan politik uang dari masing-masing calon kepala desa, tetapi dalam prakteknya masih saja terjadi politik uang yang dilakukan oleh masing-masing calon kepala desa.

Dari pengolahan hasil data menunjukkan politik uang masih marak terjadi dalam pemilihan kepala desa, selengkapnya dapat diikuti tabel berikut ini.

**Tabel. 1 Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa, di Kabupaten Magetan**

No.	Kategori/Interval Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Sangat Tinggi	5	5
2	Tinggi	24	24
3	Cukup Tinggi/Sedang	41	41
4	Rendah	26	26
5	Tidak terjadi	4	4
JUMLAH		100	100

Sumber: Data primer diolah

Politik uang dalam pemilihan kepala desa, menunjukkan 5 % cenderung terjadi sangat tinggi, 24 % dengan kecenderungan tinggi, 41 % dengan kecenderungan cukup tinggi, 26 % kecenderungan rendah terjadi, dan 4% kecenderungan tidak terjadi. Dengan demikian politik uang cenderung cukup tinggi terjadi dalam pemilihan kepala desa, ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengantisipasi politik uang dalam pemilihan kepala desa.

### ***Konflik Horisontal dalam pemilihan kepala desa.***

Pemilihan kepala desa sangat rentan terjadinya konflik horisontal, karena masyarakat akan terbelah menjadi kelompok-kelompok pendukung dari calon kepala desa, dan masing-masing pendukung akan berusaha keras untuk dapat memenangkan calon kepala desa yang didukungnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik horisontal, yaitu: perbedaan kepentingan

yang sama kuat antar pendukungnya, penggunaan isu-isu yang mendeskreditkan calon kepala desa yang lain, dan pengerahan massa yang berlebih-lebihan. Kekuatan massa yang sama kuat antar pendukung calon kepala desa dapat menumbuhkan semakin kuatnya fanatisme dan kepercayaan untuk menghadapi massa pendukung calon kepala desa lainnya, dan bahkan terdapat calon kepala desa memanfaatkan konflik permanen yang terjadi antar kelompok masyarakat. Temuan hasil penelitian menunjukkan:

*“kekuatan pendukung dari masing-masing calon kepala desa dapat mendorong munculnya konflik horisontal antar pendukungnya, sebab kekuatan yang seimbang menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan antar pendukung untuk melakukan berbagai usaha dalam pemenangan calon kepala desa yang didukungnya” (FGD, 16 Juli 2017).*

Kondisi ini sangat rentan terjadinya konflik horisontal antar warga pendukungnya, bahkan tim sukses tidak segan-segan menyebarkan informasi yang belum tentu benar dengan harapan menimbulkan polemik dan perbincangan dikalangan warga desa. Pola perilaku politik diatas, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi yang baik, cara-cara menebar informasi yang kurang baik dan belum tentu kebenarannya dianggap sebagai informasi “Hoax” yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hasil temuan penelitian menunjukkan:

*“pendekatan yang dilakukan dalam berebut simpati warga desa, juga selalu diikuti dengan menyebarkan isu-isu yang negatip yang menyudut pihak lawannya sehingga sangat rentan terjadinya konflik antar pendukung calon kepala desa. Melalui penyebaran informasi yang tidak benar diharapkan dapat mempengaruhi*



*warga desa dalam memberikan penilaian terhadap calon kepala desa lainnya” (FGD, 16 Juli 2017).*

Apabila kondisi ini berlangsung dapat memicu terjadinya konflik horisontal. Sementara, panitia pemilihan kepala desa tidak memiliki keberanian untuk melakukan penindaan terhadap kader- elit dari calon kepala desa, kelemahan inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh calon kepala desa untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji demi meraih kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

Disamping itu, pengerahan massa yang berlebihan dalam masa kampanye dari calon kepala desa dapat menumbuhkan setimen negatif dari kelompok massa pendukung lainnya, sehingga sangat potensi terjadinya konflik horisontal. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa:

*“kecenderungannya masing-masing calon kepala desa berupaya secara maksimal untuk dapat mengerahkan massa dalam kampanye yang diselenggarakan, dan bahkan cara-cara yang dilakukan untuk menggagal massa dilakukan dengan menebar uang sebagai pengganti waktu warga desa mengikutinya” (FGD, 16 Juli 2017).*

Bentuk pengerahan massa pada kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa merupakan hal yang sah dan dibenarkan dalam setiap pemilihan kepala desa. Dalam kampanye nilai dasarnya untuk menyampaikan ide, gagasan, visi dan misinya apabila terpilih menjadi kepala desa, sehingga kontestasi politik yang diharapkan adalah mengadu program kerja dari masing-masing calon kepala desa.

Dari pengolahan hasil data menunjukkan konflik horisontal cenderung masih terjadi dalam pemilihan kepala desa, selengkapnya dapat diikuti tabel berikut ini.

**Tabel. 2. Konflik Horisontal dalam Pemilihan Kepala Desa, di Kabupaten Magetan**

No.	Kategori/Interval Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Sangat Tinggi	17	17
2	Tinggi	24	24
3	Cukup Tinggi/Sedang	30	30
4	Rendah	11	11
5	Tidak terjadi	3	3
JUMLAH		100	100

Sumber: Data primer

Kepercayaan warga desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan 10% memiliki kekuatan sangat baik, 11 % dengan kekuatan baik, 22 % dengan kekuatan cukup baik, 35 % dengan kekuatan kurang baik, dan 22 % dengan kekuatan tidak baik. Dengan demikian kepercayaan warga desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa kecenderungannya memiliki nilai kurang baik, ini perlu ditingkatkan agar dapat mendorong warga desa terlibat secara aktif dalam proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Kepercayaan menjadi nilai yang penting sebagai bentuk dukungan warga desa atas pelaksanaan fungsi pemerintahan desa.

### **Hubungan Politik Uang dan Konflik Horisontal dalam pemilihan kepala desa**

Politik uang dalam pemilihan kepala desa dapat mendorong munculnya konflik horisontal, karena dalam proses berebut pengaruh kepada warga desa dilakukan dengan menyebarkan sejumlah uang kepada warga desa sebagai mahar dalam pemilihan kepala desa. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang tidak jujur karena masing-masing calon kepala desa akan berusaha untuk mengguli jumlah dan besaran uang yang diberikan kepada warga desa. Strategi pendekatan yang dilakukan masing-masing kader elitnya dengan berbagai bentuk seperti memberikan bantuan sembako, memberikan bantuan fasilitas sosial, atau memberikan janji sebagai kontrak politiknya, bahkan dengan upaya untuk mengungguli jumlah besaran uang yang dibagi-bagikan kepada warga desa.

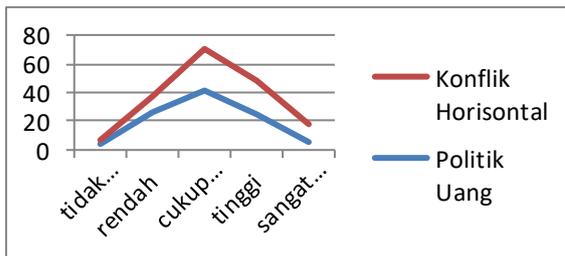
Politik uang biasanya diikuti pula dengan cara-cara negatif, seperti mendiskreditkan calon kepala desa melalui penyebaran informasi-informasi yang tidak benar dapat menjadi faktor yang tidak benar dapat menjadi faktor yang memicu konflik horisontal. Untuk memperkuat analisis diatas, dapat diikuti temuan data penelitian sebagai berikut:

**Tabel. 3** Politik uang dan hubungannya dengan Konflik Horisontal Dalam Pemilihan Kepala Desa

No.	Kategori Nilai Variabel	Variabel-Variabel Penelitian	
		Politik Uang (%)	Konflik Horisontal (%)
1	Sangat Tinggi	5	17
2	Tinggi	24	24
3	Cukup Tinggi/Sedang	41	30
4	Rendah	26	11
5	Tidak terjadi	4	3
JUMLAH		100	100

Sumber: Data primer

Dari tabel diatas, menunjukkan politik uang cenderung terjadi cukup tinggi (41%), sedangkan konflik horisontal cenderung terjadi cukup tinggi (30 %). Dengan demikian, dapat diinterpretasikan konflik horisontal berkaitan dengan politik uang, walaupun bukan satu-satunya faktor yang menjadi sebab terjadinya, misalnya faktor bebotoh atau faktor perjudian dalam pemilihan kepala desa. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti grafik berikut ini.



**Gambar 1** Perbandingan nilai terjadinya politik uang, dan nilai konflik horisontal dalam pemilihan kepala desa

Dari grafik diatas, menunjukkan politik uang kecenderungan prosentase terbesar pada nilai cukup tinggi, ini berarti politik uang sangat rentan terjadi dalam setiap pemilihan kepala desa, serta dapat memicu terjadinya konflik horisontal antar warga desa sebagai pendukung calon

kepala desa, hal ini terindikasi dari hasil penelitian menunjukkan prosentase terbesar pada nilai cukup tinggi juga. Kondisi inilah menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala desa.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Magetan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik uang dalam pemilihan kepala desa masih mewarnai dalam pemilihan kepala desa, karena politik uang sebagai sumber daya politik yang efektif untuk mempengaruhi masa pemilih.
2. Pemilihan kepala desa sangat rentan terjadinya konflik horisontal antar pendukung calon kepala desa, karena masing-masing calon berusaha bersaing untuk mengguli baik melalui politik uang maupun menebar informasi-informasi yang negatif.
3. Politik uang dapat memicu terjadinya konflik horisontal antar pendukung calon kepala desa, sehingga menciptakan suasana yang suram dan merisaukan dalam kehidupan bermasyarakat.

### Saran

1. Dibutuhkan pendidikan politik bagi warga desa agar memiliki kematangan politik dalam menyikapi peristiwa dalam pemilihan kepala desa. Dengan lebih rasional dalam menyikapi proses pemilihan kepala desa dapat menghasilkan kepala desa yang aspiratif dan kapabel..
2. Dibutuhkan komitmen dan integritas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa, khususnya masing-masing calon kepala desa untuk bersaing secara fair dan jujur.



## REFERENSI

- Abisono, F 2012, *Money in Political Contestation: An Ethnographic Study in Monet Politics Practise in Yogyakarta's Local Election 2011*, Tesis Program Politik, Fakultas Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta.
- Badoh & Djani, 2010, *Korupsi Politik di Indonesia*, Indosia Corruption Watch, Jakarta
- Harianto, 2017, Money Politics and Horizontal Conflict in The Vehiclech, *Journal of Developing Country Studies IISTE*, Volume 7 Agustus 2017.
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politcs Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Penerbit: Media Pressindo, Yogyakarta.
- Ismail, *Pengaruh Money Politis Terhadap Daya Pilih Masyarakat, Di Kabupaten Tabolng*. diakses tanggal. 7 Pebruari 2017
- Mahendra Yusril Ihza dan Nucholish Madjid. *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Politik Pasca Pemilu Dan Nasib Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Pratikno, “Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik dalam Pemilu 2004”, dalam M.Faried Cahyono dan Lambang Trijono, 2004, *Pemilu 2004 Transisi Demokrasi dan Kekerasan*, Yogyakarta: CSPS-UGM.
- Sabilal Rosyad, *Praktik Money Politics dalam Pemilu Legislatif, di Kabupaten Pekalongan Tahun 2009* (Studi Sosio-Legala-Normatif), diakses tanggal. 7 Pebruari 2017
- Saifullah, Eep, 1997, *Cotatan Atas Politik Orde Baru*, Penerbit Pustaka Pelajar Offset, Jakarta
- Schaffer (ed.) 2007. “*Election For Sale The Causes and Consequenses of Vote Buying*”. London: Lynne Reinner Publisher.
- Sumarto, M 2014, *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Umam, Ahmad Khoirul, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Penerbit: Rasail, Semarang